



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2022
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARMISATA
KOTA BLITAR**



Jalan. Ir. Soekarno Nomor 11 Blitar Telp. (0342)801815
Web site : www.blitar.go.id
Email : disbudpar@blitarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar merupakan perwujudan bentuk akuntabilitas sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2022 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

Blitar, 20 Februari 2023

KEPALA DINAS

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BLITAR



EDY WASONO, S.Sos., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 197304081992031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar melalui kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja Tahun 2022 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2022.

Adapun perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2022 meliputi :

1. **Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya”** dengan indikator **“Persentase kelompok seni budaya yang aktif”**, dengan target kinerja 60% dan mencapai realisasi 70%. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,187 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 116,66% membutuhkan anggaran sebesar 98,28%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:
 - a. Kesadaran para pelaku-pelaku seni untuk berkreasi mengembangkan jati diri etnisitasnya.
 - b. Peran aktif pemerintah dalam kegiatan kreatif kesenian.

Walaupun indikator ini dikatakan sangat berhasil, akan tetapi masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas antara lain :

- ❖ Terdapat beberapa kelompok seni budaya yang tidak mengambil peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan seni miliknya, cenderung pasif dan pasrah.
- ❖ Pembinaan terhadap kelompok seni budaya yang ada belum maksimal.

Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil, maka action plan yang akan dilaksanakan adalah :

- ❖ Mengoptimalkan peningkatan pembinaan terhadap kelompok seni budaya yang ada, dengan memberikan tempat untuk berkreasi mengembangkan jati diri.
- ❖ Mengoptimalkan penertiban layanan kartu induk kesenian.
- ❖ Peningkatan nilai, tradisi, dan warisan kekayaan budaya.

2. Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar” dengan indikator **“Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar”**, dengan target kinerja 9,24% dan mencapai realisasi 6,99%. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,76 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 75,64% membutuhkan anggaran sebesar 98,66%.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Adanya event-event daerah, sehingga meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung.

Walaupun indikator ini dikatakan berhasil, akan tetapi masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas antara lain :

- ❖ Belum optimalnya pengelolaan promosi dan paket pariwisata.
- ❖ Belum adanya Perda tentang Pariwisata.

Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil, maka action plan yang akan dilaksanakan adalah :

- ❖ Melaksanakan pengelolaan promosi dan paket pariwisata dengan optimal.
- ❖ Mengajukan draf perda tentang Pariwisata.
- ❖ Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata baik yang sudah ada maupun kawasan baru.
- ❖ Pengembangan kompetensi untuk insan pariwisata.
- ❖ Pemasaran pariwisata berbasis digital.

3. Sasaran Strategis 3 : “Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif” dengan indikator **“Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif”**, dengan target kinerja 0,12% dan mencapai realisasi 0,24%. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,003 dan dapat dikatakan tidak efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 200% hanya membutuhkan anggaran sebesar 99,85%. Capaian kinerja yang tinggi seyogyanya juga didukung dengan anggaran yang tinggi.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Pelaku ekonomi kreatif aktif mengembangkan dan meningkatkan ketrampilan.
- b. Kemajuan teknologi mendukung pengembangan ide inovasi para pelaku ekonomi kreatif.

Walaupun indikator ini dikatakan sangat berhasil, akan tetapi masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas antara lain :

- ❖ Kurang optimalnya pembinaan dan pelatihan pelaku ekonomi kreatif.
- ❖ Kurang optimalnya pengelolaan data pelaku ekonomi kreatif.
- ❖ Masih lemahnya kesadaran pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan perijinan.

Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil, maka action plan yang akan dilaksanakan adalah :

- ❖ Mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan ekonomi kreatif.
- ❖ Mengoptimalkan pengelolaan data pelaku ekonomi kreatif.
- ❖ Melakukan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan perijinan.

4. Sasaran Strategis 4 : “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” dengan indikator **“Nilai SAKIP PD”**, dengan target kinerja A (83,60) dan mencapai realisasi A (85,14). Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,04 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 101,84% membutuhkan anggaran sebesar 97,28%.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan unit kerja untuk menciptakan good governance dan clean governance di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. Dalam melaksanakan tugas berorientasi pada kinerja bulan kerja.

Walaupun indikator ini dikatakan sangat berhasil, akan tetapi masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas antara lain :

- ❖ Komitmen dari pimpinan level eselon III dan IV terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih kurang.
- ❖ Pengetahuan yang terbatas terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tataran pelaksana masih kurang.

Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil, maka action plan yang akan dilaksanakan adalah :

- ❖ Peningkatan komitmen dari pimpinan level eselon III dan IV terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- ❖ Peningkatan pengetahuan yang terbatas terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tataran pelaksana melalui sosialisasi.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar ke depan. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel, Bagan, Diagram	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	13
D. Dasar Hukum	14
E. Aspek-Aspek Strategis	16
F. Isu-Isu Strategis	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	19
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	22
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022	24
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022 ...	38
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra	39
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Pemerintah Daerah Lainnya	41
B. Akuntabilitas Keuangan	42
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	42
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	44
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
C. Prestasi/Penghargaan	48
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Langkah Perbaikan	50

Lampiran-lampiran :

- A. Matrik Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
- E. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan 2022

DAFTAR TABEL, BAGAN / DIAGRAM

1. Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4
2. Bagan 2.1 Penjelasan Singkat Terkait Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja	18
3. Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2022	20
4. Tabel 3.1 Atribut Capaian Indikator Kinerja	23
5. Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun Anggaran 2022	24
6. Bagan 3.3 Diagram Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif	25
7. Tabel 3.4 Jumlah Sanggar Seni di Kota Blitar Tahun 2022	25
8. Bagan 3.5 Diagram Jumlah Sanggar Seni di Kota Blitar Tahun 2022	26
9. Bagan 3.6 Diagram Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	28
10. Tabel 3.7 Jumlah Pengunjung pada Objek Wisata di Kota Blitar Tahun 2022	29
11. Bagan 3.8 Diagram Pengunjung pada Objek Wisata di Kota Blitar Tahun 2022	29
12. Bagan 3.9 Diagram persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif 2022	31
13. Tabel 3.10 Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2022	32
14. Bagan 3.11 Diagram Sub Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2022	33
15. Bagan 3.12 Diagram Nilai SAKIP PD	35
16. Tabel 3.13 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022	36
17. Tabel 3.14 Target dan Realisasi PAD sektor Pariwisata Tahun Anggaran 2019 s/d 2022	37

18. Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja	38
19. Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RENSTRA	39
20. Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Lainnya	41
21. Tabel 3.18 Alokasi Per Sasaran Pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2022	42
22. Tabel 3.19 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	44
23. Tabel 3.20 Anggaran Tahun 2022	47
24. Tabel 3.21 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap kinerja sasaran strategis yang didukung oleh pemerintah daerah.

Disamping sebagai kewajiban, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, dalam arti mengalami peningkatan/penurunan baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan kinerja organisasi. Program dan kebijakan merupakan amanat yang harus diselenggarakan karena merupakan bagian dari proses penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Keberhasilan atau kegagalan dari kinerja sasaran strategis perangkat daerah akan berpengaruh pada LKjIP Daerah secara keseluruhan. Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar diharapkan dapat menjadi :

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;

3. Daya dorong bagi SKPD lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
7. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

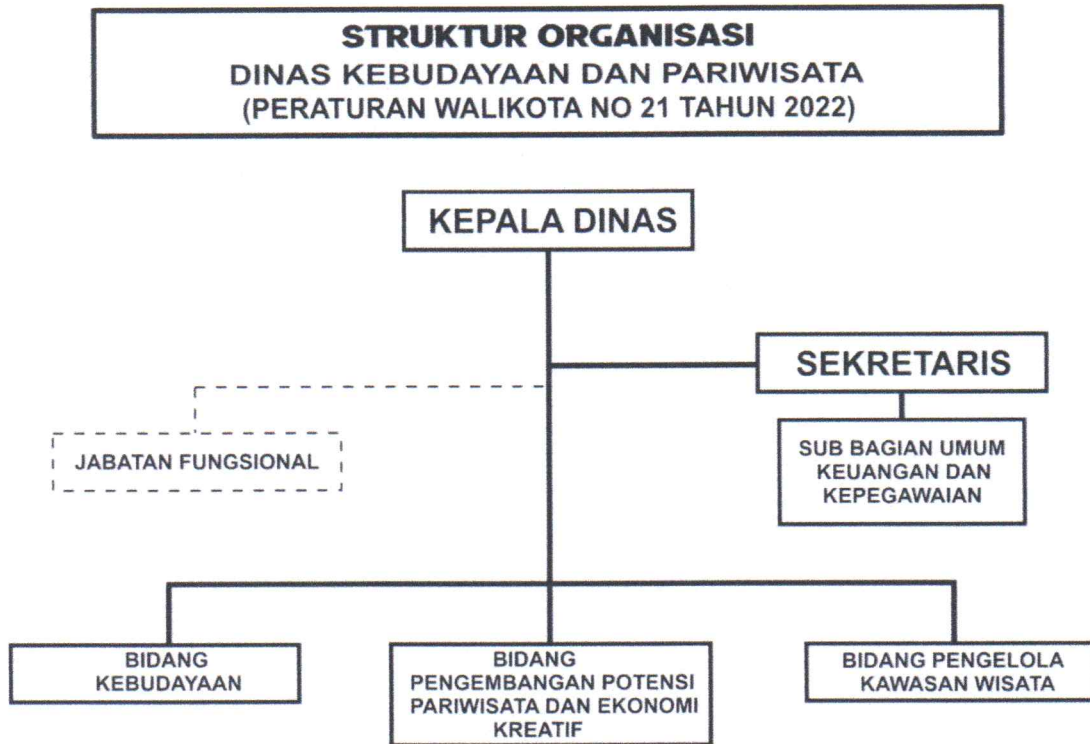
11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebudayaan dan pariwisata;
13. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
14. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporn pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata;
15. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kebudayaan;
16. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembinaan sejarah;
17. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
18. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
19. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemasaran pariwisata;
20. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
21. Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata; dan
22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, terdiri atas :

1. Sekretariat yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
2. Bidang Kebudayaan;
3. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Bidang Pengelolaan Kawasan Pariwisata;
5. Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagan 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Sedangkan fungsi yang melekat dari masing-masing organisasi yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar itu antara lain :

1. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan dinas meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan. Untuk menjalankan tugas , Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;

2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
4. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
6. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
9. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
11. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
13. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
14. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
16. Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
17. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;

18. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
19. Fasilitas pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
20. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan dan tugas pokok dan fungsi;
21. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
22. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan kebudayaan dan pariwisata;
23. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
24. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
25. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
27. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
28. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Dinas membawahi 1 Sub Bagian yaitu :

a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Untuk menjalankannya, Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan tugas :

1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
3. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
4. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, penatausahaan barang, kepegawaian dan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
5. Melakukan penatausahaan keuangan Dinas dan pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
6. Penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas;
7. Melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan;
8. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
9. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
10. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
11. Melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris atau asset perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
13. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat urusan kebudayaan dan pariwisata;
14. Menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan;
15. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
16. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

17. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
18. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Kebudayaan.

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kebudayaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Kebudayaan. Untuk menjalankan tugas, Bidang Kebudayaan menjalankan fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang kebudayaan;
3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pelestarian budaya dan cagar budaya serta pengembangan seni budaya;
4. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, nilai tradisi dan kesenian daerah;
5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman;
6. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan daerah di bidang penulisan dan pemahaman sejarah, serta inventarisasi, dokumentasi dan publikasi sejarah;
7. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan dan kerjasama di bidang kebudayaan;

8. Pembinaan pendampingan seni pertunjukan;
9. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara;
10. Pelaksanaan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya;
11. Fasilitasi urusan pembinaan perfilman;
12. Fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
13. Fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dunia;
14. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang kebudayaan;
15. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota;
16. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota;
17. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kota; dan
18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk menjalankan tugas, Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi kreatif menjalankan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;

3. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pengembangan sistem informasi pariwisata dan penerapan standarisasi bidang pariwisata;
5. Menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan kerja sama regional dan internasional di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Menyelenggarakan kegiatan widya wisata;
7. Menyelenggarakan kegiatan promosi wisata;
8. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
9. Melakukan pendataan hasil kerja di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan obyek wisata, daya tarik wisata, serta usaha jasa dan penyuluhan wisata;
11. Melakukan inventarisasi dan penggalian potensi obyek wisata dan kawasan wisata;
12. Melakukan pengembangan obyek wisata dan destinasi wisata museum PETA;
13. Menyelenggarakan pemberdayaan perekonomian pada masyarakat lingkungan obyek wisata dan kawasan wisata;
14. Melakukan pengembangan informasi pariwisata, pembentukan dan pengelolaan pusat pelayanan informasi pariwisata;
15. Melakukan kegiatan kampanye sadar wisata dan sapta pesona;
16. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
17. Pembinaan dan pengendalian di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
18. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
19. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
20. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;

21. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan pstrategis pariwisata; dan
22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengelolaan Kawasan Wisata

Bidang Pengelola Kawasan Wisata dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelola Kawasan Wisata yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelola Kawasan Wisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Pengelola Kawasan Wisata. Untuk menjalankan tugas, Bidang Pengelola Kawasan Wisata melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelola Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Pengelola Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan kawasan wisata khususnya Pusat Informasi dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
4. Perumusan kebijakan operasional Pengelola kawasan wisata khususnya Pusat Informasi Psriwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
5. Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian sarana prasarana Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
6. Peningkatan, pengembangan, penertiban, pengawasan dan pengendalian Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi

- Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
7. Pengelolaan retribusi Bidang pengelolaan Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
 8. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
 9. Penyusunan kebijakan standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberin bimbingan teknis dan evaluasi Pengelola Kawasa Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
 10. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdadangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
 11. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana Kawasan Wisata khusunya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
 12. Pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengelola Kawasan Wisata khusunya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
 13. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang serta pengaturan petugas lapangan;
 14. Fasilitasi penyambutan dan mengarahkan kedatangan wisatawan ke Kawasan Wisata Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang serta memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan;
 15. Pengkoordinasian pemberian bantuan darurat kepada wisatawan yang membutuhkan pelayanan medis;
 16. Fasilitasi pemeliharaan kenyamanan, keamanan, ketertiban dan kebersihan Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;

17. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Pengelola Kawasan Wisata;
18. Pengelola daya tarik wisata;
19. Pengelola kawasan strategis pariwisata;
20. Pengelola destinasi pariwisata;
21. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah; dan
22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar selama satu Tahun 2022, dengan tujuan :

- 1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kota Blitar, Provinsi, Pusat maupun Masyarakat;
- 2) Memberikan informasi capaian sasaran pembangunan daerah guna penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026);
- 3) Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan datang;

- 4) Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2022 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;

19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022–2026.

E. Aspek – Aspek Strategis

1. Aspek Stragegis Kebudayaan

Salah satu bentuk pembangunan di Kota Blitar adalah pelestarian dan pengembangan kawasan budaya seperti tempat Makam Bung Karno, Istana Gebang, Makam Aryo Blitar, dan situs-situs lain yang masih dalam pengkajian dan penelitian.

Penyelenggaraan aktivitas seni budaya oleh Pemerintah Kota Blitar setiap tahunnya diparalelkan dengan upaya pengembangan pariwisata agar para pelaku seni budaya memperoleh manfaat secara ekonomi, yang pada gilirannya dapat mendukung pelestarian dan pengembangan seni budaya itu sendiri. Penyelenggaraan kegiatan seni budaya dapat diselenggarakan oleh pemerintah Kota Blitar dalam rangka pembinaan pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.

2. Aspek Stragegis Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu potensi andalan untuk meningkatkan kinerja perekonomian Kota Blitar sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas dalam rencana

pembangunan Kota Blitar. Sejalan dengan hal tersebut, upaya pengembangan sektor pariwisata terus ditingkatkan guna mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Blitar.

Setelah pasca covid 19, di tahun 2022 destinasi wisata yang ada di Kota Blitar kembali dibuka. Wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Kota Blitar diantaranya Makam Bung Karno, Istana Gebang, Waterpark Sumber Udel, Kampung Bathok, Kampung Kendang Sentul, Goa Maria Sendangrejo, Telaga Nirmala, Agrowisata Belimbing Karang Sari, Green Park Bendogerit, Green Park Sentul, Kebon Rojo, Fish Garden, dan Makam Aryo Blitar, pada tahun 2022 mencapai sebesar 1.999.868 pengunjung.

F. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian kondisi daerah maka isu-isu strategis di bidang kebudayaan dan pariwisata yang diangkat adalah sebagai berikut :

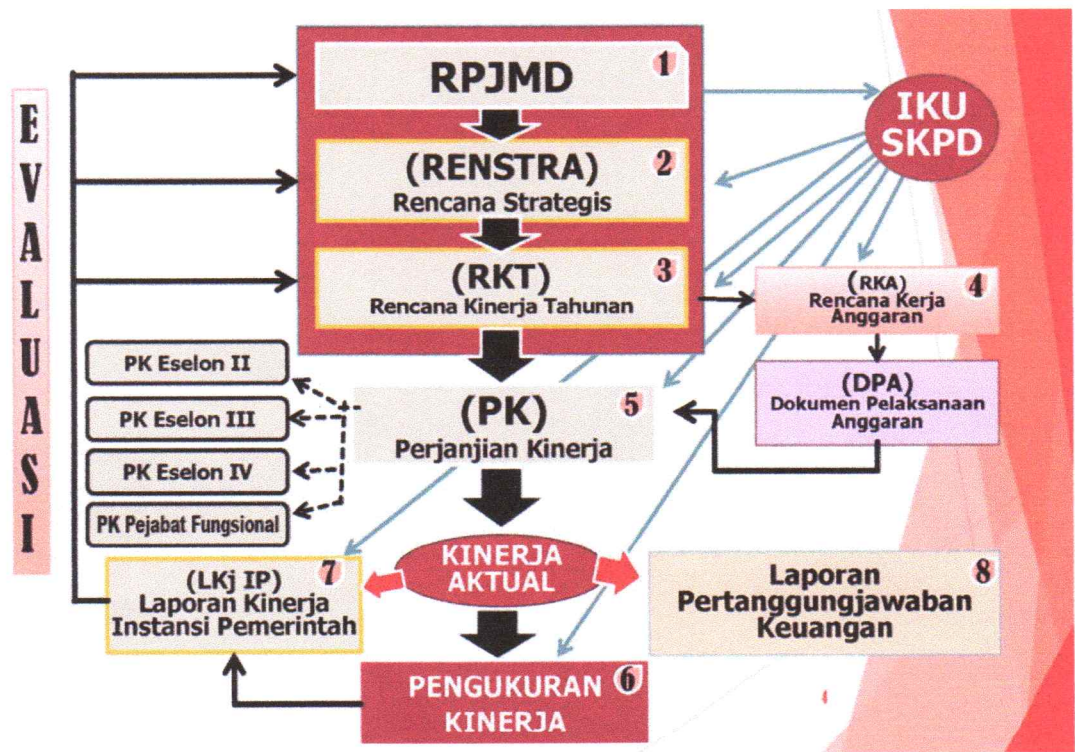
- a) Belum optimalnya pelestarian budaya lokal;
- b) Belum optimalnya pemanfaatan potensi wisata;
- c) Kurangnya kapasitas pelaku-pelaku ekonomi kreatif Kota Blitar.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis dan tahunan disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana yang tujuannya yaitu untuk mengetahui potensi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar serta untuk mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Bagan 2.1
Penjelasan singkat terkait perencanaan dan perjanjian kinerja



A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah : “**KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat**“. Sedangkan misi yang diampu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Blitar tersebut, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai Tujuan :

- 1) **Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya;**
- 2) **Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.**

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kota Blitar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar untuk Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2026 dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Adapun Rencana Strategis

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam “ LAMPIRAN LKjIP I. Matriks Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2021 – 2026”.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar melalui kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja Tahun 2022 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2022. Adapun untuk Perjanjian Kinerja PD 2022 terdapat pada LKjIP 2022 sebagaimana lampiran dibawah :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	60%
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	9,24%
3	Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	0,12%
4	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	83,60

Untuk melaksanakan masing-masing sasaran strategis, diperlukan pagu anggaran sebesar Rp. 13.406.656.458,- yang terbagi ke dalam program-program berikut :

1. Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya
 - ❖ Program Pengembangan kebudayaan dengan pagu Rp. 963.480.300,- dari sumber dana DBH;
 - ❖ Program Pengembangan Sejarah dengan pagu Rp. 956.139.300,- dari sumber dana DBH;
 - ❖ Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan pagu Rp 166.213.000,- dari sumber dana DBH.
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar
 - ❖ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan pagu Rp. 2.669.130.400,- dari sumber dana DBH;
 - ❖ Program Pemasaran Pariwisata dengan pagu Rp 281.318.200,- dari sumber dana DBH.
3. Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif
 - ❖ Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pagu Rp 82.829.960,- dari sumber dana DBH.
4. Meningkatnya kinerja perangkat daerah
 - ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 8.287.545.298,- dari sumber dana DAU dan DBH.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Arti nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh pengguna anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis. Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk :

- Merencanakan kinerja dan target kinerja;
- Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan;
- Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, serta;
- Telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran

Dalam implementasi Sistem AKIP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun 2021, target akhir Renstra 2021 –

2026 serta target pemerintah daerah lainnya. Pencapaian indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun Anggaran 2022 berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya, dapat dijelaskan perhitungannya sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$Persentase\ tingkat\ capaian = \frac{Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$Persentase\ tingkat\ capaian = \frac{Rencana - (Realisasi - Rencana)}{Rencana} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

Tabel 3.1
Atribut Capaian Indikator Kinerja

NO.	NILAI CAPAIAN KINERJA		ATRIBUT
	%	KETERANGAN PERSENTASE	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target Dan Realisasi Tahun 2022

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pada tahun 2022 merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar yang ditunjukkan dalam tabel berikut :

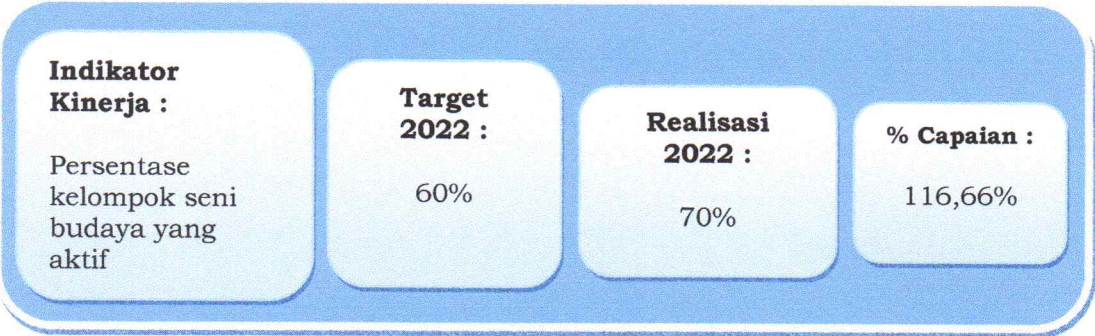
Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Utama
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
Tahun Anggaran 2022

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ATRIBUT
Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	60%	70%	116,66%	Sangat Berhasil
Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	9,24%	6,99%	75,64%	Berhasil
Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	0,12%	0,24%	200%	Sangat Berhasil
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	83,60	85,14	101,84%	Sangat Berhasil

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2022

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2022 sebagai berikut :

a. **Sasaran Strategis 1)** : “Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya” , mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 116,66% dengan rincian sebagai berikut :



Bagan 3.3
Diagram Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif



Jumlah kelompok seni budaya yang terdaftar dan aktif di Kota Blitar tahun 2022 disajikan pada tabel 3.4, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Jumlah Sanggar Seni di Kota Blitar Tahun 2022

No	Sub Sektor	Jumlah yang ada	Terdaftar/ Aktif
1	Seni Teater		
	Teater modern	14	6
	Film	4	2
	Teater Tradisional	2	2
	Wayang Kulit	18	18

2	Seni Tari		
	Tari Tradisional	12	10
	Tari Kreasi Baru	54	35
3	Seni Rupa		
	Seni Lukis	8	4
	Seni Kriya	8	5
	Seni Ukir/patung	2	2
	Tosan Aji	1	1
	Batu Mulia/Suiseki	2	0
	Bonsai	1	0
4	Seni Musik		
	Keroncong/Tradisional	16	12
	Modern/Pop/ Rock	23	19
	Orkes Melayu/Dangdut/Akustik	9	5
	Sholawat	2	2
	Karawitan	3	3
5	Sastra		
	Macapat	2	1
	Puisi	1	1
Total		182	128

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2022

Bagan 3.5
Diagram Jumlah Sanggar Seni di Kota Blitar Tahun 2022



Keterangan :

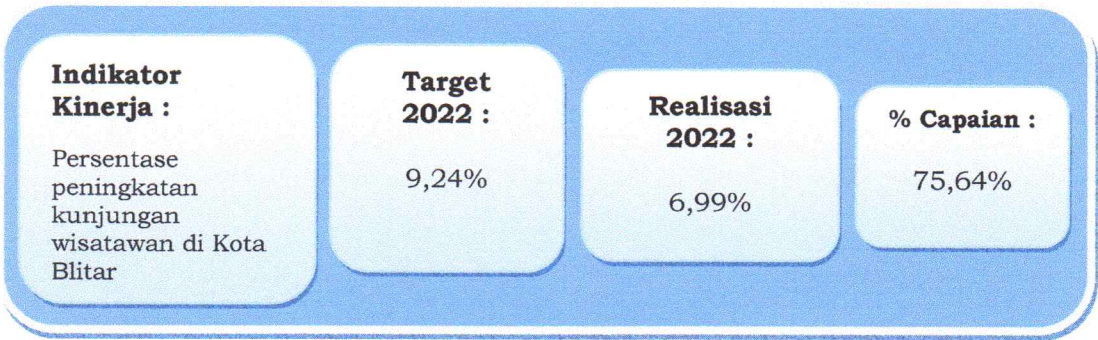
1. Jumlah kelompok seni budaya yang ada di tahun 2022 sebanyak 182 kelompok, sedangkan kelompok seni budaya yang aktif selama tahun 2022 sebanyak 128 kelompok.
2. Perhitungan persentase kelompok seni budaya yang aktif adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Persentase} & & \text{Jumlah kelompok} \\ \text{kelompok} & & \text{seni yang terdaftar} \\ \text{seni budaya} & = & \frac{\text{Jumlah kelompok}}{\text{seni yang ada}} \times 100 \% \\ \text{yang aktif} & & \\ & = & \frac{128}{182} \times 100 \% \\ & = & 70 \%\end{aligned}$$

3. Pada indikator kinerja **persentase kelompok seni budaya yang aktif** terealisasi 70% dari target sebesar 60% dengan tingkat capaian 116,66%. Artinya target kinerja sudah tercapai dan untuk indikator ini dapat dikatakan **sangat berhasil**.
4. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Kesadaran para pelaku-pelaku seni untuk berkreasi mengembangkan jati diri etnisitasnya.
 - b. Peran aktif pemerintah dalam kegiatan kreatif kesenian.
5. Walaupun indikator ini dikatakan sangat berhasil, akan tetapi masih ada kendala - kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas antara lain :
 - ❖ Terdapat beberapa kelompok seni budaya yang tidak mengambil peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan seni miliknya, cenderung pasif dan pasrah.
 - ❖ Pembinaan terhadap kelompok seni budaya yang ada belum maksimal.
6. Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil, maka action plan yang akan dilaksanakan adalah :
 - ❖ Mengoptimalkan peningkatan pembinaan terhadap kelompok seni budaya yang ada, dengan memberikan tempat untuk berkreasi mengembangkan jati diri.

- ❖ Mengoptimalkan penertiban layanan kartu induk kesenian.
- ❖ Peningkatan nilai, tradisi, dan warisan kekayaan budaya.

b. Sasaran Strategis 2) : “Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar” , mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 75,64% dengan rincian sebagai berikut :



Bagan 3.6
Diagram Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar



Peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar tahun 2022 disajikan pada tabel 3.7, sebagai berikut :

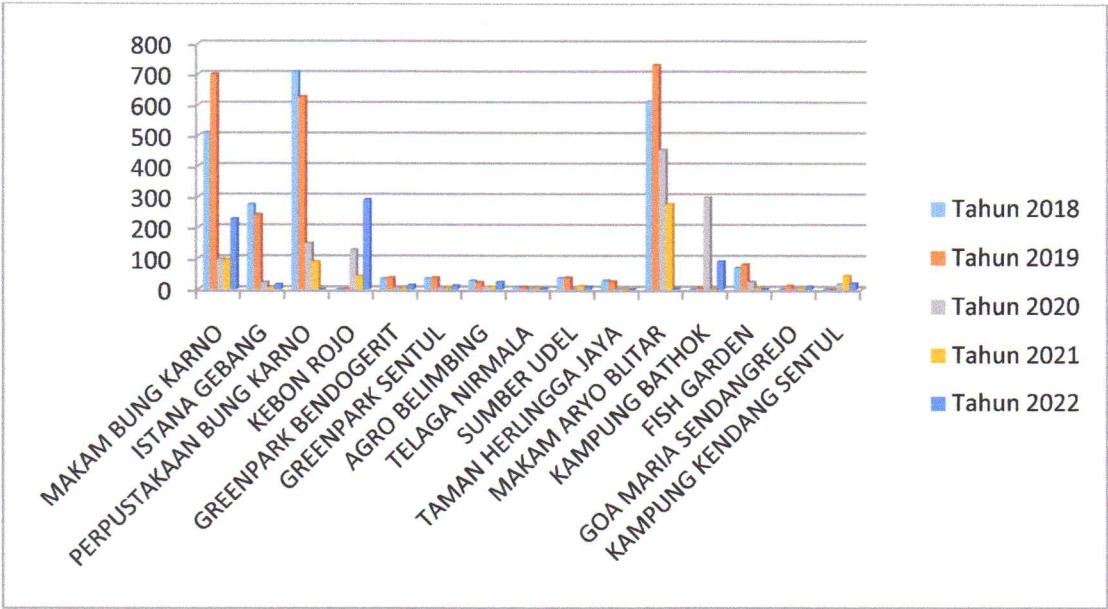
Tabel 3.7
Jumlah Pengunjung pada Objek Wisata di Kota Blitar 2022

No	Objek Wisata	Jumlah				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022

No	Objek Wisata	Jumlah				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	MAKAM BUNG KARNO	509.886	699.246	98.121	96.528	228.019
2	ISTANA GEBANG	274.766	241.394	22.804	4.128	16.449
3	PERPUSTAKAAN BUNG KARNO	707.985	626.399	149.238	89.375	1.180.897
4	KEBON ROJO	1.400.325	1.331.464	128.520	42.378	291.100
5	GREENPARK BENDOGERIT	35.178	37.398	4.738	2.372	13.853
6	GREENPARK SENTUL	35.014	37.258	6.040	3.695	12.408
7	AGRO BELIMBING	27.802	22.259	8.415	7.023	23.635
8	TELAGA NIRMALA	8.514	6.388	2.360	2.065	2.494
9	SUMBER UDEL	36.635	37.526	-	10.745	8.410
10	TAMAN HERLINGGA JAYA	28.716	25.487	2.329	-	-
11	MAKAM ARYO BLITAR	612	730	454	275	1.550
12	KAMPUNG BATHOK	-	3.700	297	-	90
13	FISH GARDEN	69.847	79.800	24.766	2.506	1.687
14	GOA MARIA SENDANGREJO	-	11.261	2.035	3.933	9.556
15	KAMPUNG KENDANG SENTUL	-	-	17	44	20
Jumlah		3.135.280	3.160.310	450.134	250.067	1.999.868

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2022

Bagan 3.8
Diagram Pengunjung pada Objek Wisata di Kota Blitar Tahun 2022



Keterangan :

1. Jumlah pengunjung pada objek wisata di Kota Blitar Tahun 2022 sebanyak 1.999.868 wisatawan, sedangkan pengunjung pada objek wisata di Kota Blitar Tahun 2021 sebanyak 250.067 wisatawan.
2. Perhitungan Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} & \quad \text{Jumlah wisatawan} \\ \text{peningkatan} & \quad \text{tahun (N) - Jumlah} \\ \text{kunjungan} & \quad \text{wisatawan tahun} \\ \text{wisatawan di} & \quad \text{dasar} \\ \text{Kota Blitar} & \quad \text{Jumlah wisatawan} \\ & \quad \text{tahun dasar} \\ & = \frac{\quad}{\quad} \times 100 \% \\ & = \frac{1.999.868 - 250.067}{250.067} \times 100 \% \\ & = \frac{1.749.801}{250.067} \times 100 \% \\ & = 6,99 \% \end{aligned}$$

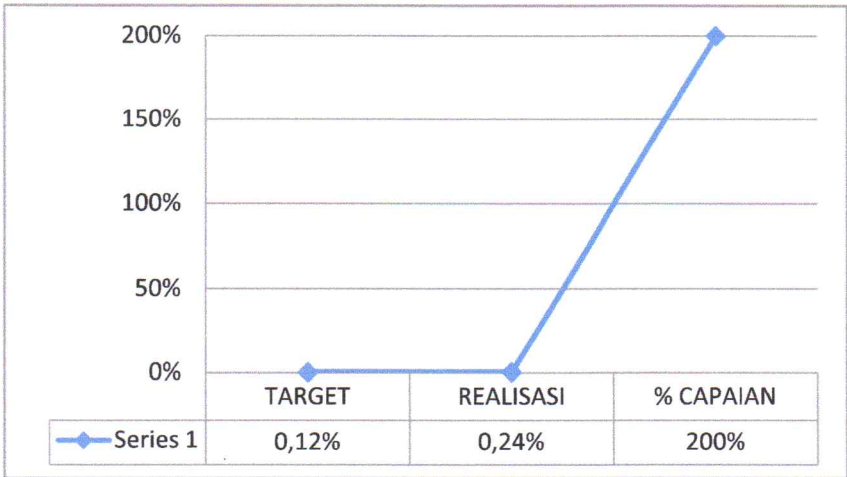
3. Pada indikator kinerja **persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar** terealisasi 6,99% dari target sebesar 9,24% dengan tingkat capaian 75,64%. Artinya untuk indikator ini target kinerja belum tercapai walaupun atribut capaian indikator kinerja dapat dikatakan **berhasil**. Pasca pandemi Covid 19, destinasi wisata sudah dibuka, jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Blitar sebenarnya sudah meningkat dari tahun sebelumnya, akan tetapi realisasi capaian kinerja masih di bawah target.
4. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Adanya event-event daerah, sehingga meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung.
5. Walaupun indikator ini dikatakan berhasil, akan tetapi masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas antara lain :
 - ❖ Belum optimalnya pengelolaan promosi dan paket pariwisata.

- ❖ Belum adanya Perda tentang Pariwisata.
6. Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil, maka action plan yang akan dilaksanakan adalah :
- ❖ Melaksanakan pengelolaan promosi dan paket pariwisata dengan optimal.
 - ❖ Mengajukan draf perda tentang Pariwisata.
 - ❖ Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata baik yang sudah ada maupun kawasan baru.
 - ❖ Pengembangan kompetensi untuk insan pariwisata.
 - ❖ Pemasaran pariwisata berbasis digital.

c. Sasaran Strategis 3) : “Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif” , mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 200% dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja :	Target 2022 :	Realisasi 2022 :	% Capaian :
Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	0,12%	0.24%	200%

Bagan 3.9
Diagram persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif 2022



Peningkatan jumlah sub sektor ekonomi kreatif tahun 2022 disajikan pada tabel 3.10, sebagai berikut :

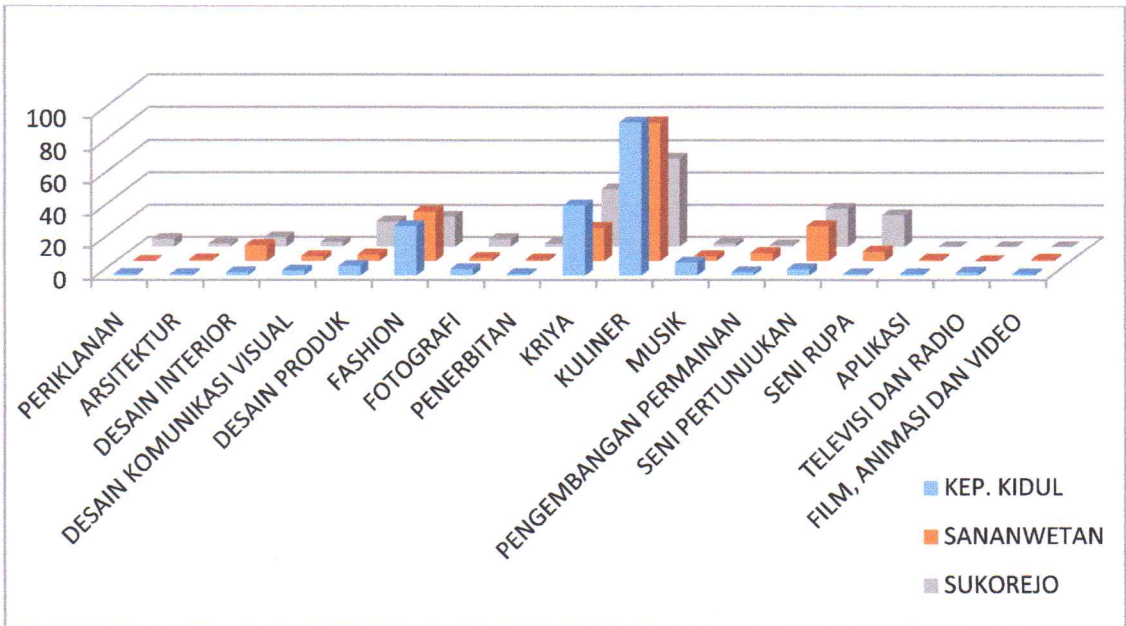
Tabel 3.10

Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2022

NO	SUB SEKTOR	TAHUN 2021				TAHUN 2022			
		KECAMATAN			TOTAL	KECAMATAN			TOTAL
		KEP. KIDUL	SANAN WETAN	SUKO REJO		KEP. KIDUL	SANAN WETAN	SUKO REJO	
1	PERIKLANAN	-	3	6	9	-	3	6	9
2	ARSITEKTUR	1	-	2	3	1	-	2	3
3	DESAIN INTERIOR	2	13	3	18	2	14	3	19
4	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	3	6	3	12	3	6	3	12
5	DESAIN PRODUK	6	3	16	25	6	4	16	26
6	FASHION	20	33	17	70	20	33	17	70
7	FOTOGRAFI	4	4	3	11	4	4	4	12
8	PENERBITAN	1	11	-	12	1	11	-	12
9	KRIYA	30	40	29	99	33	40	29	102
10	KULINER	80	71	29	180	80	73	31	184
11	MUSIK	8	4	2	14	8	4	2	14
12	PENGEMBANGAN PERMAINAN	2	3	1	6	2	3	1	6
13	SENI PERTUNJUKAN	5	28	23	56	5	28	23	56
14	SENI RUPA	1	7	15	23	1	8	18	27
15	APLIKASI	1	3	-	4	1	3	-	4
16	TELEVISI DAN RADIO	2	-	-	2	2	-	-	2
17	FILM, ANIMASI DAN VIDEO	1	4	-	5	1	4	-	5
TOTAL		167	233	149	549	170	238	155	563

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2022

Bagan 3.11
Diagram Sub Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2022



Keterangan :

1. Jumlah sub sektor ekonomi kreatif Tahun 2022 sebanyak 563 sektor, sedangkan sub sektor ekonomi kreatif Tahun 2021 sebanyak 549 sektor, sehingga di tahun 2022 kegiatan ekonomi kreatif yang dilaksanakan sebanyak 14 sub sektor.
2. Perhitungan Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut :

Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif

=

Jumlah kegiatan ekraf yang dilaksanakan tahun N

Jumlah sektor ekraf yang ada

X 100 %

=

563 - 549

563

X 100 %

=

14

563

X 100 %

=

0,24 %

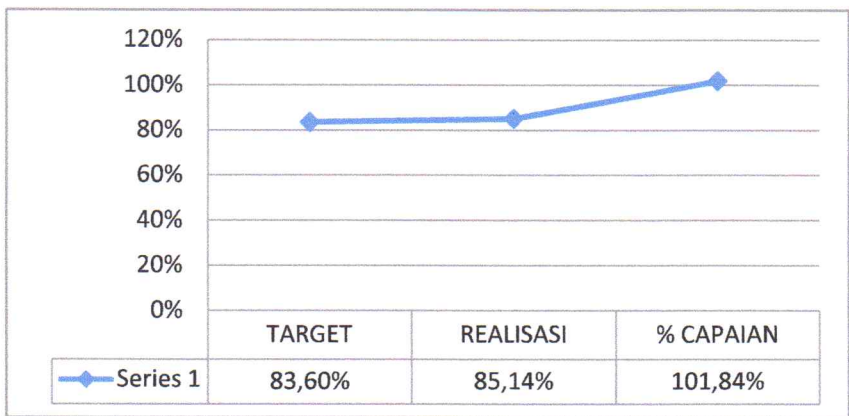
3. Pada indikator kinerja **persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif** terealisasi 0,24% dari target sebesar

- 0,12% dengan tingkat capaian 200%. Artinya target kinerja sudah tercapai dan untuk indikator ini dapat dikatakan **sangat berhasil**.
4. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Pelaku ekonomi kreatif aktif mengembangkan dan meningkatkan ketrampilan.
 - b. Kemajuan teknologi mendukung pengembangan ide inovasi para pelaku ekonomi kreatif.
 5. Walaupun indikator ini dikatakan sangat berhasil, akan tetapi masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas antara lain :
 - ❖ Kurang optimalnya pembinaan dan pelatihan pelaku ekonomi kreatif.
 - ❖ Kurang optimalnya pengelolaan data pelaku ekonomi kreatif.
 - ❖ Masih lemahnya kesadaran pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan perijinan.
 6. Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil, maka action plan yang akan dilaksanakan adalah :
 - ❖ Mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan ekonomi kreatif.
 - ❖ Mengoptimalkan pengelolaan data pelaku ekonomi kreatif.
 - ❖ Melakukan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan perijinan.

d. Sasaran Strategis 4) : “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” , mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 101,84% dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja :	Target 2022 :	Realisasi 2022 :	% Capaian :
Nilai SAKIP PD	83,60	85,14	101,84%

Bagan 3.12
Diagram Nilai SAKIP PD



Keterangan :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2022 adalah 85,14.
2. Pada indikator kinerja Nilai SAKIP PD terealisasi 85,14 dari target sebesar 83,60 dengan tingkat capaian 101,84%. Artinya target kinerja sudah tercapai dan untuk indikator ini dapat dikatakan **sangat berhasil**.
3. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan unit kerja untuk menciptakan good governance dan clean governance di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 - b. Dalam melaksanakan tugas berorientasi pada kinerja bulan kerja.
4. Walaupun indikator ini dikatakan sangat berhasil, akan tetapi masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas antara lain :
 - ❖ Komitmen dari pimpinan level eselon III dan IV terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih kurang.
 - ❖ Pengetahuan yang terbatas terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tataran pelaksana masih kurang.
5. Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil, maka action plan yang akan dilaksanakan adalah :

- ❖ Peningkatan komitmen dari pimpinan level eselon III dan IV terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- ❖ Peningkatan pengetahuan yang terbatas terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tataran pelaksana melalui sosialisasi.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	116,66%	√			
Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	75,64%		√		
Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	200%	√			
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	101,84%	√			
Rata – rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis / Sasaran		123,53%	SANGAT BERHASIL			

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja utama tersebut, menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar selama tahun 2022 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai capaian kinerja **123,53 % (seratus dua puluh tiga koma lima puluh tiga persen).**

e. Selain melaksanakan target capaian sasaran strategis organisasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2022 juga menghimpun PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari sektor Pariwisata. Dari total target PAD Rp. 1.619.884.000,- telah terealisasi Rp. 1.418.627.000,-. Kedepan diharapkan potensi PAD terus meningkat seiring dengan dinamika yang tumbuh di masyarakat. Target dan Realisasi PAD sektor Pariwisata disajikan pada tabel 3.14, sebagai berikut :

Tabel 3.14

Target dan Realisasi PAD sektor Pariwisata

Tahun Anggaran 2019 s/d 2022

No	Sumber PAD	2019		2020		2021		2022	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair (MCK PIPP)	10.500.000	10.900.000	5.000.000	5.170.000	5.000.000	5.244.000	10.500.000	11.826.000
2	Sewa Kios MBK	73.464.000	73.464.000	42.854.000	42.854.000	73.464.000	55.098.000	73.464.000	73.560.000
3	Sewa Kios PIPP	79.920.000	79.920.000	42.700.000	42.700.000	79.920.000	59.940.000	79.920.000	79.920.000
4	Kios Los PIPP			3.920.000	3.920.000				
5	Kios Los Istana Gebang			8.960.000	8.960.000	22.476.000	16.857.000	26.532.000	26.532.000
6	Graha Patria	150.000.000	108.000.000	7.500.000	8.500.000	50.000.000	-	250.000.000	27.000.000
7	Sewa Waterpak SBU	360.000.000	360.000.000	35.650.000	270.000.000	280.000.000	167.500.000	290.000.000	243.000.000
8	Sewa Tanah PK5	55.000.000	56.102.000	15.000.000	18.578.000	54.996.000	20.420.000	123.501.000	38.455.000
9	Sewa Tanah Event lainnya	60.000.000	60.000.000	28.267.000	28.267.000	39.021.000	-	34.965.000	2.000.000
10	Parkir bus di PIPP	109.980.000	112.980.000	30.000.000	44.685.000	31.500.000	36.150.000	109.980.000	83.100.000
11	Parkir minibus	70.220.000	57.900.000	13.900.000	22.550.000	12.500.000	14.130.000	70.220.000	26.530.000
12	Retribusi pengunjung	1.000.800.000	1.048.140.000	300.000.000	372.360.000	265.002.000	301.968.000	500.802000	736.104.000
13	Sewa Gedung Kesenian	90.000.000	68.968.750	10.743.750	13.863.750	60.000.000	35.100.000	50.000.000	70.600.000
Jumlah			2.068.884.000	2.036.654.750	544.494.750	882.407.750	973.879.000	1.619.884.000	1.418.627.000

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2022

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022

Adapun perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2021 - 2022 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	100%	60%	88%	70%
Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	9,20%	9,24%	-41,42%	6,99%
Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	NA	0,12%	NA	0,24%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	83,50	83,60	83,97	85,14

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2022

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada realisasi indikator persentase kelompok seni budaya yang aktif, pada tahun 2022 lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 tercapai 88%, sedangkan tahun 2022 tercapai 70%. Untuk kedepannya akan lebih mengoptimalkan peningkatan pembinaan terhadap kelompok seni budaya yang ada, dengan memberikan tempat untuk berkreasi mengembangkan jati diri.
2. Pada realisasi indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan capaian realisasi indikatornya, walaupun target belum tercapai. Pada tahun 2021 yaitu dari -41,42% dan pada tahun 2022 naik menjadi 6,99%. Untuk kedepannya akan melaksanakan pengelolaan promosi dan paket pariwisata dengan optimal.

3. Pada realisasi indikator persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif pada tahun 2022 yaitu 0,24% dan melampaui target yang ada. Namun tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan berbeda indikatornya. Untuk kedepannya akan lebih mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan ekonomi kreatif.
4. Pada indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan realisasi capaian. Pada tahun 2022 mencapai nilai 85,14, sedangkan pada tahun 2021 mencapai nilai 83,97. Untuk kedepannya akan lebih meningkatkan komitmen terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2022 dapat dikatakan **Sangat Berhasil** walaupun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga akan dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RENSTRA

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2022 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI S/D 2022	% TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	75%	70%	93,33%

2	Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	9,66%	6,99%	72,36%
3	Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	0,12%	0,24%	200%
4	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	83,85	85,14	101,53%

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2022

Dari data di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada indikator persentase kelompok seni budaya yang aktif, target sampai akhir renstra yaitu 75% dan sampai tahun 2022 sudah tercapai 70%, sehingga sudah terdapat kemajuan sebesar 93,33%. Untuk mempercepat capaian target sampai akhir renstra, kedepannya akan lebih mengoptimalkan peningkatan pembinaan terhadap kelompok seni budaya yang ada, dengan memberikan tempat untuk berkreasi mengembangkan jati diri.
2. Pada indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar, target sampai akhir renstra yaitu 9,66% dan sampai tahun 2022 sudah tercapai 6,99%, sehingga sudah terdapat kemajuan sebesar 72,36%. Untuk mempercepat capaian target sampai akhir renstra, kedepannya akan melaksanakan pengelolaan promosi dan paket pariwisata dengan optimal.
3. Pada indikator persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif, target sampai akhir renstra yaitu 0,12% dan sampai tahun 2022 sudah tercapai 0,24%, sehingga sudah tercapai sebesar 200%. Namun demikian, untuk dapat mempertahankan capaian target sampai akhir renstra, kedepannya tetap akan lebih mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan ekonomi kreatif.
4. Pada indikator Nilai SAKIP PD, target sampai akhir renstra yaitu 83,85 dan sampai tahun 2022 sudah tercapai 85,14, sehingga sudah tercapai sebesar 101,53%. Namun demikian, untuk dapat mempertahankan capaian target sampai akhir renstra, kedepannya akan lebih meningkatkan komitmen terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Pemerintah Daerah Lainnya

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan kinerja Pemerintah Daerah Lainnya seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Lainnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI S/D 2022	REALISASI KABUPATEN PONOROGO	KET
1	Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	70%	5 %	
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	6,99%	5 %	
3	Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	0,24%	-	
4	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A (85,14)	B	

Sumber data : DisBudParPoRa Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

Dari data di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada indikator kinerja persentase kelompok seni budaya yang aktif, persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar, realisasi capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk indikator kinerja persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif, untuk Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo tidak mengampu indikator kinerja tersebut.
3. Pada indikator kinerja nilai SAKIP PD, realisasi capaian kinerja

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo di tahun 2022 memperoleh nilai B, sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar memperoleh nilai A (85,14). Hal ini berarti bahwa realisasi capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo.

B. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar mengalokasikan belanja langsung program/kegiatan dalam APBD 2022.

1) Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran belanja langsung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.18
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	2.085.832.600	15,56%
Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	2.950.448.600	22,01%
Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	82.829.960	0,62%

Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	8.287.545.298	61,82%
	JUMLAH KESELURUHAN	13.406.656.458	100%

Keterangan :

- ❖ Untuk sasaran strategis kesatu dengan indikator persentase kelompok seni budaya yang aktif dengan anggaran sebesar Rp 2.085.832.600,- atau sebesar 15,56% dari total anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- ❖ Untuk sasaran strategis kedua dengan indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar dengan anggaran sebesar Rp 2.950.448.600,- atau sebesar 22,01% dari total anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- ❖ Untuk sasaran strategis ketiga dengan indikator persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif dengan anggaran sebesar Rp 82.829.960,- atau sebesar 0,62% dari total anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- ❖ Untuk sasaran strategis keempat dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 8.287.545.298,- termasuk di dalamnya anggaran untuk gaji dan tunjangan PNS, atau sebesar 61,82% dari total anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2) Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.19
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 2022

KINERJA UTAMA/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran strategis 1 :							
Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	60%	70%	116,66%	2.085.832.600	2.049.983.500	98,28%
Program :							
Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	60%	60%	100%	963.480.300	946.111.600	98,20%
Pembinaan Sejarah	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	80%	80%	100%	956.139.300	947.018.000	99,05%
Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikembangkan	50%	50%	100%	166.213.000	156.853.900	94,37%

Sasaran strategis 2 :							
Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	9,24%	6,99%	75,64%	2.950.448.600	2.910.931.326	98,66%
Program :							
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata	25%	25%	100%	2.669.130.400	2.638.863.432	98,87%
	Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno	30%	30%	100%			
	Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	50%	50%	100%			
	Persentase peningkatan usaha pariwisata	20%	20%	100%			
Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	0,04%	0,04%	100%	281.318.200	272.067.894	96,71%
Sasaran strategis 3 :							
Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	0,12%	0,24%	200%	82.829.960	82.708.200	99,85%
Program :							
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	3,0%	3,0%	100%	82.829.960	82.708.200	99,85%

Sasaran strategis 4 :							
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	83,60	85,14	101,84%	8.287.545.298	8.062.324.209	97,28
Program :							
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	100	8.287.545.298	8.062.324.209	97,28

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah dituangkan dan ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2022, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dijabarkan dalam beberapa program dan anggaran dengan capaian sebagaimana tersaji pada lampiran.

Realisasi Tahun Anggaran 2022

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2022 jumlah anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20
ANGGARAN TAHUN 2022

URAIAN	TARGET	REALISASI
Pendapatan	1.619.884.000	1.418.627.000
Belanja Modal	1.348.599.105	1.334.420.898
Belanja Operasional	12.058.057.353	11.771.526.337

3) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.21
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	KET
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	116,66%	98,28%	1,187	Efisien
Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	75,64%	98,66%	0,76	Efisien
Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	200%	99,85%	2,003	Tidak Efisien

Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	101,84%	97,28%	1,04	Efisien
---------------------------------------	----------------	---------	--------	------	---------

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

- Sasaran Strategis 1 :** Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya“** tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,187 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 116,66% membutuhkan anggaran sebesar 98,28%.
- Sasaran Strategis 2 :** Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar“**, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,76 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 75,64% membutuhkan anggaran sebesar 98,66%.
- Sasaran Strategis 3 :** Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif“**, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,003 dan dapat dikatakan tidak efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 200% hanya membutuhkan anggaran sebesar 99,85%. Capaian kinerja yang tinggi seyogyanya juga didukung dengan anggaran yang tinggi.
- Sasaran Strategis 4 :** Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah“**, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,04 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 101,84% membutuhkan anggaran sebesar 97,28%.

C. Prestasi / Penghargaan

Pada tahun 2022 ini ada prestasi atau penghargaan yang diperoleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar diantaranya sebagai berikut :

- Piala dan Piagam Penghargaan dari Pemerintah Kota Blitar sebagai Juara 2 Blitar Ethnic National Carnival Kategori Ethnic Peringatan HUT RI Ke-77.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar disusun berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2021-2022 dengan kesesuaian dokumen RKT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2022, serta Perjanjian Kinerja 2022. Dalam laporan ini mengukur kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar yang terdiri atas 4 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap indikator kinerja pada LKjIP 2022 dikategorikan sudah berhasil karena nilai capaiannya sesuai target. Capaian Kinerja tiap-tiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ATRIBUT
Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	60%	70%	116,66%	Sangat Berhasil

Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	9,24%	6,99%	75,64%	Berhasil
Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	0,12%	0,24%	200%	Sangat Berhasil
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	83,60	85,14	101,84%	Sangat Berhasil

B. Langkah Perbaikan

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah :

- ❖ Mengoptimalkan peningkatan pembinaan terhadap kelompok seni budaya yang ada, dengan memberikan tempat untuk berkreasi mengembangkan jati diri;
- ❖ Mengoptimalkan penertiban layanan kartu induk kesenian;
- ❖ Peningkatan nilai, tradisi, dan warisan kekayaan budaya;
- ❖ Melaksanakan pengelolaan promosi dan paket pariwisata dengan optimal;
- ❖ Mengajukan draf perda tentang Pariwisata;
- ❖ Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata baik yang sudah ada maupun kawasan baru;
- ❖ Pengembangan kompetensi untuk insan pariwisata;
- ❖ Pemasaran pariwisata berbasis digital;
- ❖ Mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan ekonomi kreatif;
- ❖ Mengoptimalkan pengelolaan data pelaku ekonomi kreatif;
- ❖ Melakukan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan perijinan;
- ❖ Peningkatan komitmen dari pimpinan level eselon III dan IV terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- ❖ Peningkatan pengetahuan yang terbatas terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tataran pelaksana melalui sosialisasi.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2022, semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan kinerja sasaran strategis pada satuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 20 Pebruari 2023

KEPALA DINAS

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BLITAR



EDY WASONO, S.Sos. M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 197304081992031004

Lampiran I
MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026

VISI : Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT

MISI : 1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital

TUJUAN						SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN		INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				2020	2022				2020	2022			
1	Misi ke-1 Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N - Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N-1 / Jumlah warisan budaya lokal yang ada tahun N-1 X 100	0,50%	0,99%	Meningkatnya Kualitas kegiatan Seni Budaya	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	Jumlah kelompok seni yang terdaftar / Jumlah kelompok seni yang ada X 100	70%	60%	▪ Peningkatan pelestarian nilai budaya ▪ Peningkatan pelestarian cagar budaya	▪ Peningkatan nilai, tradisi, dan warisan kekayaan budaya ▪ Peningkatan identifikasi dan pengelolaan cagar budaya	
2	Misi ke-3 Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai PDRB sektor akomodasi dan makan minum tahun N - Nilai PDRB sektor akomodasi dan makan minum tahun N-1 / Nilai	-0,25%	0,75%	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Jumlah wisatawan tahun N - Jumlah wisatawan tahun dasar / Jumlah wisatawan tahun dasar x 100	452.552 wisatawan	9,24%	▪ Pengembangan destinasi pariwisata ▪ Pengembangan SDM Pariwisata ▪ Pemasaran pariwisata baru	▪ Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata yang sudah ada ▪ Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata baru	

			PDRB sektor akomodasi dan makan minum tahun N-1 X 100									▪ Pengembangan kompetensi untuk insan pariwisata ▪ Pemasaran pariwisata berbasis digital	
		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekraf tahun N - Jumlah pelaku ekraf tahun dasar / Jumlah ekraf tahun dasar X 100	4,0%	1,5%	Meningkatnya aktivitas ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan ekraf yang dilaksanakan tahun N / Jumlah sektor ekraf yang ada X 100	4%	0,12%	▪ Pengembangan sub sektor ekonomi kreatif	▪ Pembinaan pelaku ekonomi kreatif dan menumbuhkan pelaku ekonomi kreatif baru ▪ Optimalisasi pengembangan sub sektor ekonomi kreatif unggulan	
3	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP DisBudPar pada tahun bersangkutan		A (83,60)	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP DisBudPar pada tahun bersangkutan		A (83,60)	Penguatan kelembagaan berbasis kinerja	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan	

Lampiran II
RENCANA KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

TUJUAN : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya
INDIKATOR : Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal

N O	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Kegiatan Seni Budaya	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	60%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	60%	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi	9 orang	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana kebudayaan yang tersedia dan terpelihara	1 jenis	86.064.800
										Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah kelompok seni yang mengikuti pementasan kesenian daerah di luar daerah	8 kelompok	264.945.500
							Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi	8 kelompok	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah kelompok seni yang mengikuti pementasan kesenian di Kota Blitar	8 kelompok	612.470.000

				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	80%	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi	7 event	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah peserta event sejarah dan seni tradisional yang diselenggarakan	6 peserta	283.918.400
										Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang tersedia	1 jenis	672.220.900
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikembangkan	50%	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	1 cagar	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah obyek cagar budaya yang dilestarikan	2 lokasi	166.213.000

TUJUAN : **Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif**

INDIKATOR : **1. Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**
2. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif

N O	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN URAIAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	25%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata	25%	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola	3 obyek	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana kawasan wisata yang beroperasional dengan baik	3 obyek	372.747.100
					Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung	30%				Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	Jumlah sarana prasarana kawasan MBK yang terpelihara/ terbangun	3 obyek	893.469.500

					Karno					Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
					Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	50%	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola dengan baik	1 destinasi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang terbangun	1 destinasi	1.085.810.000
					Persentase peningkatan usaha pariwisata	20%				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah peserta festival	140 orang	273.633.400
							Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pelaku usaha yang terdaftar	1 dokumen	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi usaha pariwisata	30 orang	43.470.400
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	0,04%	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan	9 media	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media informasi dan sistem informasi pariwisata ekonomi kreatif yang dikelola	4 media	73.266.100,
										Fasilitasi Kegiatan	Jumlah event pariwisata dan	3 event	130.353.300

										Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	ekonomi kreatif yang diselenggarakan		
										Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota , Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen pendataan dan penyebaran informasi yang tersedia	1 dokumen	54.000.000
										Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kemitraan kampung kreatif yang terbentuk	1 paket	23.698.800
2	Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	3,0%	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	3,0%	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekraf yang ikut kegiatan	34 orang	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina	25 orang	46.189.960
										Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peserta event pariwisata yang terselenggara	9 peserta	36.640.000

TUJUAN : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah
INDIKATOR : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

N O	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN URAIAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka 83,60 (A)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka 80 (A)	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	10 dokumen	5.000.000
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LkjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribunal)	7 dokumen	30.460.100
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	37 orang	4.241.375.768
										Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah jenis laporan	2 laporan	12.900.000

										Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	keuangan bulanan/semest eran yang disusun		
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin/kartu/ab sensi yang terpenuhi	1 unit	5.099.200
										Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 event	50.385.600
											Jumlah publikasi program/kegiat an perangkat daerah	4 publikasi	210.401.180
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	28 komponen	31.901.600
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis	46.527.600
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	43 jenis	54.208.832
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan	428 dos	31.773.500

											minuman yang tersedia		
											Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	48 macam	27.269.800
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	7 cetakan	12.869.000
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	60 exemplar	11.520.000
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	62 rakor	206.697.200
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	12 rekening/ bulan	414.249.907
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga outshorcing yang terbayarkan	75 orang	2.439.920.906
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional terpelihara	6 unit	101.104.200
											Jumlah kendaraan dinas	14 unit	6.590.000,

											yang terbayarkan pajaknya		
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, scanner, kamera, mesin fax)	5 jenis	16.123.600
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 gedung	265.000.005
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	3 jenis	66.167.300

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDY WASONO, S.Sos., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd

Jabatan : WALIKOTA BLITAR

Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA BLITAR

Blitar, 18 Oktober 2022
Kepala Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata Kota Blitar



Drs. SANTOSO, M.Pd



EDY WASONO, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197304081992031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

NO	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas kegiatan Seni Budaya	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	60.00 (%)
2	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	9.24 (%)
3	Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	0.12 (%)
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	83.60(Angka)

No	PROGRAM	Anggaran	KET
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	963.480.300,00	DBH
2	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	956.139.300,00	DBH
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	166.213.000,00	DBH
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.287.545.298,00	DAU dan DBH
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.669.130.400,00	DBH
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	281.318.200,00	DBH
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	82.829.960,00	DBH
JUMLAH		13.406.656.458,00	

WALIKOTA BLITAR



Blitar, 18 Oktober 2022
Kepala Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata Kota Blitar



Lampiran IV
PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar
Tahun : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Kualitas kegiatan Seni Budaya	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	Jumlah kelompok seni yang terdaftar / Jumlah kelompok seni yang ada X 100	60%	70%	116,66%		Program Pengembangan Kebudayaan	963.480.300	946.111.600	98,20%	
								Program Pembinaan Sejarah	956.139.300	947.018.000	99,05%	
								Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	166.213.000	156.853.900	94,37%	
2	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Jumlah wisatawan tahun N - Jumlah wisatawan tahun dasar / Jumlah wisatawan tahun dasar x 100	9,24%	6,99%	75,64%		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.669.130.400	2.638.863.432	98,87%	
								Program Pemasaran Pariwisata	281.318.200	272.067.894	96,71%	
3	Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan ekraf yang dilaksanakan tahun N / Jumlah sektor ekraf yang ada X 100	0,12%	0,24%	200%		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	82.829.960	82.708.200	99,85%	
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP DisBudPar pada tahun bersangkutan	A (83,60)	A (85,14)	101,84%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.287.545.298	8.062.324.209	97,28%	

Lampiran V

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 2022

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
		K	Rp	K	Rp	K	A
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	60	963.480.300	60	946.111.600	100	98,20
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi	9	351.010.300	9	343.508.000	100	97,86
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana kebudayaan yang tersedia dan terpelihara	1	86.064.800	1	81.488.000	100	94,68
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah kelompok seni yang mengikuti pementasan kesenian daerah di luar daerah	8	264.945.500	8	262.020.000	100	98,90
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi	8	612.470.000	8	602.603.600	100	98,39
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah kelompok seni yang mengikuti pementasan kesenian di Kota Blitar	8	612.470.000	8	602.603.600	100	98,39
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	80	956.139.300	80	947.018.000	100	99,05
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi	7	956.139.300	7	947.018.000	100	99,05

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
		K	Rp	K	Rp	K	A
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah peserta event sejarah dan seni tradisional yang diselenggarakan	6	283.918.400	6	280.429.700	100	98,77
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang tersedia	1	672.220.900	1	666.588.300	100	99,16
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikembangkan	50	166.213.000	50	156.853.900	100	94,37
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	1	166.213.000	1	156.853.900	100	94,37
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah obyek cagar budaya yang dilestarikan	2	166.213.000	2	156.853.900	100	94,37
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata	25	2.669.130.400	25	2.638.863.432	100	98,87
	Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno	30		30		100	
	Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	50		50		100	
	Persentase peningkatan usaha pariwisata	20		20		100	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola	3	1.266.216.600	3	1.250.457.510	100	98,76
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana kawasan wisata yang beroperasi dengan baik	3	372.747.100	3	368.665.260	100	98,90

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
		K	Rp	K	Rp	K	A
Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana prasarana kawasan MBK yang terpelihara/ terbangun	3	893.469.500	3	881.792.250	100	98,69
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	1	1.359.443.400	1	1.347.678.522	100	99,13
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang terbangun	1	1.085.810.000	1	1.079.220.122	100	99,39
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah peserta festival	140	273.633.400	140	268.458.400	100	98,11
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pelaku usaha yang terdaftar	1	43.470.400	1	40.727.400	100	93,69
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi usaha pariwisata	30	43.470.400	30	40.727.400	100	93,69
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	0,04	281.318.200	0,04	272.067.894	100	96,71
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan	9	281.318.200	9	272.067.894	100	96,71
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media informasi dan sistem informasi pariwisata ekonomi kreatif yang terkelola	4	73.266.100,	4	72.776.000	100	99,33

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
		K	Rp	K	Rp	K	A
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pariwisata dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan	3	130.353.300	3	121.619.894	100	93,30
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen pendataan dan penyebaran informasi yang tersedia	1	54.000.000	1	54.000.000	100	100
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kemitraan kampung kreatif yang terbentuk	1	23.698.800	1	23.672.000	100	99,89
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	3,0	82.829.960	3,0	82.708.200	100	99,85
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekraf yang ikut kegiatan	34	82.829.960	34	82.708.200	100	99,85
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina	25	46.189.960	25	46.140.200	100	99,89
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peserta event pariwisata yang terselenggara	9	36.640.000	9	36.568.000	100	99,80
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	8.287.545.298	80	8.062.324.209	100	97,28
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	35.460.100	100	34.991.200	100	98,68

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
		K	Rp	K	Rp	K	A
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	10	5.000.000	10	4.993.600	100	99,87
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LkjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribunal)	7	30.460.100	7	29.997.600	100	98,48
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	4.254.275.768	100	4.116.400.760	100	96,76
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	37	4.241.375.768	37	4.103.500.760	100	96,75
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	2	12.900.000	2	12.900.000	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	265.885.980	100	259.584.250	100	97,63
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin/kartu/absensi yang terpenuhi	1	5.099.200	1	5.099.000	100	100
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4	50.385.600	4	50.215.000	100	99,66

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
		K	Rp	K	Rp	K	A
	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	4	210.401.180	4	204.270.250	100	97,09
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	422.767.532	100	419.017.484	100	99,11
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia	28	31.901.600	28	29.867.805	100	93,62
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4	46.527.600	4	46.332.000	100	99,58
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	43	54.208.832	43	53.383.650	100	98,48
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	428	31.773.500	428	31.634.000	100	99,56
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	48	27.269.800	48	27.216.800	100	99,80
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	7	12.869.000	7	12.489.000	100	97,05
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	60	11.520.000	60	11.484.000	100	99,69
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	62	206.697.200	62	206.610.229	100	99,96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	2.854.170.813	100	2.789.548.420	100	97,74

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
		K	Rp	K	Rp	K	A
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	12	414.249.907	12	352.653.556	100	85,13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga outshorching yang terbayarkan	75	2.439.920.906	75	2.436.894.864	100	99,88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100	454.985.105	100	442.782.095	100	97,32
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional terpelihara	6	101.104.200	6	92.706.445	100	91,69
	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	14	6.590.000,	14	4.752.500	100	72,12
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, scanner, kamera, mesin fax)	5	16.123.600	5	16.118.000	100	99,97
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1	265.000.005	1	263.319.800	100	99,37
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	3	66.167.300	3	65.885.350	100	99,57